



KEBIJAKAN PUBLIK

Tim Penulis :

Imanuddin Hasbi - Hartoto - Dyah Maharani - Sriyani - Ella Dewi Latifah
Ardhana Januar Mahardhani - Indri Arrafi J - Hikmah Nurain - Attifah Meita Rahmah - Ahmad Subagiyo
Juanrico Alfaramona Sumarezs Titahelu - Charia Roswita - Renaldy Lukmanul Hakim
Khairul Rijal - Virginia Claudia Lao - Fajar Setyaning Dwi Putra

KEBIJAKAN PUBLIK

Tim Penulis :

Imanuddin Hasbi - Hartoto - Dyah Maharani - Sriyani - Ella Dewi Latifah
Ardhana Januar Mahardhani - Indri Arrafi J - Hikmah Nurain - Attifah Meita Rahmah - Ahmad Subagiyo
Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu - Charia Roswita - Renaldy Lukmanul Hakim
Khairul Rijal - Virginia Claudia Lao - Fajar Setyaning Dwi Putra



KEBIJAKAN PUBLIK

Tim Penulis:

Imanuddin Hasbi, Hartoto, Dyah Maharani, Sriyani, Ella Dewi Latifah, Ardhana Januar Mahardhani, Indri Arrafi J, Hikmah Nurain, Attifah Meita Rahmah, Ahmad Subagiyo, Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu, Charia Roswita, Renaldy Lukmanul Hakim, Khairul Rijal, Virginia Claudia Lao, Fajar Setyaning Dwi Putra.

Desain Cover:

Usman Taufik

Tata Letak:

Aji Abdullatif R

Proofreader:

Aas Masruroh

ISBN:

978-623-6092-82-8

Cetakan Pertama:

Juli, 2021

Hak Cipta 2021, Pada Penulis

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2021

by Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:

WIDINA BHAKTI PERSADA BANDUNG

(Grup CV. Widina Media Utama)

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 360/JBA/2020

Website: www.penerbitwidina.com

Instagram: @penerbitwidina

PRAKATA

Rasa syukur yang teramat dalam dan tiada kata lain yang patut kami ucapkan selain mengucap rasa syukur. Karena berkat rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, buku yang berjudul “Kebijakan Publik” telah selesai di susun dan berhasil diterbitkan, semoga buku ini dapat memberikan sumbangsih keilmuan dan penambah wawasan bagi siapa saja yang memiliki minat terhadap pembahasan tentang Kebijakan Publik.

Akan tetapi pada akhirnya kami mengakui bahwa tulisan ini terdapat beberapa kekurangan dan jauh dari kata sempurna, sebagaimana pepatah menyebutkan “*tiada gading yang tidak retak*” dan sejatinya kesempurnaan hanyalah milik tuhan semata. Maka dari itu, kami dengan senang hati secara terbuka untuk menerima berbagai kritik dan saran dari para pembaca sekalian, hal tersebut tentu sangat diperlukan sebagai bagian dari upaya kami untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan karya selanjutnya di masa yang akan datang.

Terakhir, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan turut andil dalam seluruh rangkaian proses penyusunan dan penerbitan buku ini, sehingga buku ini bisa hadir di hadapan sidang pembaca. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak dan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan ilmu pengetahuan di Indonesia.

Juli, 2021

Tim Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB 1 PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP PUBLIK	1
A. Pendahuluan.....	1
B. Kebijakan	2
C. Kebijakan publik	6
D. Ruang lingkup kebijakan publik	19
E. Rangkuman materi	23
BAB 2 EVOLUSI STUDI KEBIJAKAN PUBLIK	25
A. Pendahuluan.....	25
B. Pengertian evolusi studi kebijakan publik	25
C. Sejarah perkembangan kebijakan publik di dunia.....	28
D. Sejarah perkembangan kebijakan publik di Indonesia	31
E. Rangkuman materi	35
BAB 3 PENDEKATAN DALAM KEBIJAKAN PUBLIK (MENURUT PARA TOKOH)	43
A. Pendahuluan.....	43
B. Sejarah kebijakan publik.....	45
C. Pengertian kebijakan publik menurut para ahli	47
D. Model kebijakan publik	50
E. Etika dan kebijakan publik.....	53
F. Rangkuman materi	56
BAB 4 PROSES KEBIJAKAN PUBLIK	59
A. Pendahuluan.....	59
B. Gambaran umum kebijakan publik	59
C. Proses pembuatan kebijakan publik.....	61
D. Model kebijakan publik	70
E. Rangkuman materi	73

BAB 5 EVALUASI DAN DAMPAK KEBIJAKAN PUBLIK	77
A. Pendahuluan.....	77
B. Pengertian evaluasi kebijakan	78
C. Sifat, tujuan dan fungsi evaluasi.....	79
D. Konsep evaluasi kebijakan.....	83
E. Tipe evaluasi kebijakan.....	84
F. Tahapan evaluasi kebijakan.....	86
G. Evaluasi dampak kebijakan.....	87
H. Rangkuman materi	89
BAB 6 PERUBAHAN KEBIJAKAN PUBLIK.....	93
A. Pendahuluan.....	93
B. Perubahan kebijakan	94
C. Terminasi kebijakan	96
D. Reformasi kebijakan	98
E. Model perubahan kebijakan.....	99
F. Jejaring kebijakan	101
G. Rangkuman materi	103
BAB 7 PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP EFEKTIVITAS PROGRAM KELUARGA BERENCANA "DUA ANAK CUKUP" OLEH BKKBN.....	109
A. Pendahuluan.....	109
B. Teori dan tinjauan pustaka.....	111
C. Metodologi penelitian	113
D. Pembahasan	114
E. Rangkuman materi	126
BAB 8 PERAN INFORMASI DALAM PEMBUATAN KEBIJAKAN PUBLIK.....	131
A. Pengertian data dan informasi	131
B. Jenis-jenis informasi	132
C. Kebutuhan informasi dan pengolahan data	133
D. Kualitas informasi	133
E. Pentingnya informasi dalam pembuatan kebijakan.....	134
F. Informasi yang relevan dengan kebijakan.....	135
G. Kebijakan informasi	139

H. Kebijakan informasi di negara lain	140
I. Kasus Indonesia	142
J. Ruang lingkup hak atas informasi.....	144
K. Prinsip penting UU informasi.....	144
L. Penutup	145
M. Rangkuman materi	145
BAB 9 HUKUM DAN KEBIJAKAN PUBLIK.....	149
A. Pendahuluan.....	149
B. Pengertian, unsur, tujuan dan fungsi hukum	151
C. Jenis-jenis hukum	153
D. Konsep dan pengertian tentang kebijakan publik	154
E. Hubungan antara hukum dan kebijakan publik	161
F. Rangkuman materi	167
BAB 10 ANALISIS PENDAPAT MASYARAKAT MENGENAI KEBIJAKAN PENDIDIKAN SEKSUALITAS BAGI REMAJA	171
A. Pendahuluan.....	171
B. Teori dan tinjauan pustaka	173
C. Metode penelitian	174
D. Pengolahan data	175
E. Hasil dan pembahasan.....	175
F. Rangkuman materi	184
BAB 11 KEBIJAKAN PUBLIK BIDANG EKONOMI.....	189
A. Pendahuluan.....	189
B. Pengertian kebijakan publik bidang ekonomi	192
C. Proses kebijakan publik bidang ekonomi	192
D. Faktor yang mempengaruhi pembuatan kebijakan publik bidang Ekonomi.....	193
E. Faktor-faktor pendukung implementasi kebijakan publik bidang Ekonomi.....	194
F. Faktor penghambat implementasi kebijakan publik bidang Ekonomi.....	195
G. Diskusi kasus kebijakan publik bidang ekonomi.....	196
H. Rangkuman materi	199

BAB 12 KEBIJAKAN PUBLIK BIDANG TRANSPORTASI	203
A. Pendahuluan.....	203
B. Definisi kebijakan publik.....	210
C. Kebijakan publik bidang transportasi udara.....	212
D. Kebijakan publik bidang transportasi laut.....	213
E. Kebijakan publik bidang transportasi darat.....	215
F. Kebijakan publik bidang transportasi sungai/danau.....	219
G. Permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat terkait penegakan kebijakan publik bidang transportasi.....	221
H. Rangkuman materi	223
BAB 13 TRANSFORMASI KEWARGANEGARAAN DIGITAL DAN KEAMANAN SIBER NASIONAL ABAD 21	227
A. Pendahuluan	227
B. Transformasi kewarganegaraan ke arah kewarganegaraan Digital.....	228
C. Media sosial.....	229
D. Era revolusi industri 4.0 sebagai abad keterbukaan dan literasi Digital.....	230
E. Urgensi keamanan siber nasional.....	232
F. Rangkuman materi	238
GLOSARIUM	242
PROFIL PENULIS.....	250



PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP PUBLIK

Dr. Imanuddin Hasbi, S.T., M.M.
Universitas Telkom

A. PENDAHULUAN

Kata kebijakan berasal dari bentuk kata dasar bijak yang mendapat imbuhan gabung ke-...-an. Kata “kebijakan” mengandung makna garis haluan (*policy*). Garis haluan, mengandung makna (1) rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak mengenai pemerintahan atau organisasi). (2) pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud untuk manajemen dalam usaha mencari sasaran. Kebijakan adalah suatu ketentuan dari tindakan yang mempengaruhi pelaksanaan suatu kegiatan.

Misal:

- Kebijakan fiskal oleh pemerintah untuk menghadapi masa pandemic Corona (Covid 19).
- Kemendikbud sedang menyusun konsep kebijakan standar pendidikan nasional era pandemik Covid 19.

Sementara itu, kata kebijaksanaan berasal dari kata bijaksana mendapat imbuhan gabung ke-...-an. Kata “kebijaksanaan” berarti “kepandaian menggunakan akal budi (wisdom).” Kebijaksanaan adalah

TUGAS DAN EVALUASI

Terdiri dari 5 (Lima) buah pertanyaan yang bersifat tekstual ataupun konstektual analisis berikut:

1. Jelaskan perbedaan dan persamaan kebijakan dengan kebijaksanaan dan beri contohnya?
2. Apa yang dimaksud dengan kebijakan dan berikan contohnya?
3. Jelaskan yang dimaksud kebijakan dan kebijakan publik?
4. Jelaskan tujuan kebijakan publik?
5. Jelaskan ruang lingkup kebijakan publik?

DAFTAR PUSTAKA

- Fischer, Frank, Miller, Gerald J. dan Sidney, Mara S. (2007). Handbook of Public Policy. New York: CRC Press Taylor & Francis Group.
- Gerald, Caiden E. (ed.). (1982). Strategies for Administrative Reform. Toronto: Lexington Book.
- Smith, Kevin B. dan Larimer, Christopher. (2009). The Public Policy Theory Primer. 3rd Edition. New York: Taylor & Francis Group.
- Weimer, David L. dan Vining, Aidin R. (2005). Policy Analysis: Concepts and Practice. 4th Edition. New Jersey: Pearson Prentice Hall.
- MacRae, Duncan, Jr. dan Wilde, James A. (1985). Policy Analysis For Public Decisions. New York: University Press of America.
- Nugroho, Riant Dwijodijoto. 2003. Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, Evaluasi, Jakarta : PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.
- Sawicki, David S. dan Patton, Carl V. (1986). Basic Methods od Policy Analysis & Planning. New Jersey: Prentice Hall.



EVOLUSI STUDI KEBIJAKAN PUBLIK

Ir. Hartoto, M.Si.

STAI Miftahul Ulum Tanjungpinang

A. PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang pengertian kebijakan publik, termasuk secara khusus dikupas pengertian evolusi yang sering digunakan dalam perkembangan terkait dengan studi kebijakan publik. Kemudian dijelaskan tentang perbedaan evolusi dengan adaptasi. Dalam evolusi studi kebijakan publik pada bagian akhir diuraikan perkembangan studi kebijakan publik, serta adanya daftar pertanyaan untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta didik terhadap materi perkembangan studi kebijakan publik.

B. PENGERTIAN EVOLUSI STUDI KEBIJAKAN PUBLIK

Pengertian evolusi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), evolusi merupakan perubahan pertumbuhan atau perkembangan secara bertahap. Menurut Wikipedia bahasa Indonesia, evaluasi merupakan proses secara bertahap dan berubah menjadi bentuk lain yang lebih baik.

Pengertian adaptasi merupakan proses penyesuaian diri dengan cara menyesuaikan situasi yang berkembang agar dapat bertahan dengan adanya perubahan-perubahan yang terus terjadi. Sedangkan menurut

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Dwiyanto (editor), 2008. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Gajah Mada University Press, Yogyakarta dan JICA, Jepang.
- Agus Dwiyanto, 2012. *Manajemen Pelayanan Publik, Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif*. Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Agus Dwiyanto, dkk, 2012. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Bambang Istianto, 2011. *Manajemen Pemerintahan Dalam Prespektif Pelayanan Publik*. Penerbit Mitra Wacana Media bekerjasama dengan STIAMI, Jakarta.
- Budi Winarno, 2011. *Kebijakan Publik, Teori, Proses, dan Studi Kasus*. CAPS, Yogyakarta.
- Diana Fawzia. dkk, 2018. *Sistem Presidensial Indonesia dari Soekarno ke Jokowi*. AIPI, Jakarta.
- Dimpos Hutajalu. 2009. *Gerakan Sosial dan Perubahan Kebijakan Publik*, Fakultas Ekonomi, Gajah Mada University Press bekerjasama dengan KSPPM, Yogyakarta.
- Taufikurohman, 2014. *Kebijakan Publik, Pendelegasian Tanggungjawab Negara kepada Presiden selaku Penyelenggaraan Pemerintahan*. Penerbit FISIP Universitas Mustafa, Jakarta.
- Warsito Utomo, 2009. *Administrasi Publik Baru Indonesia*. Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Warsito Utomo, 2009. *Dinamika Administrasi Publik, Analisis Empiris Seputar Isu-isu Kontemporer dalam Administrasi Publik*. Penerbit Pustaka Pelajar bekerjasama dengan Program Magister Administrasi Publik UGM, Yogyakarta.
- Wayne Parsons, 2011. *Public Policy, Pengantar Teori dan Praktek Analisis Kebijakan*. Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- William N. Dunn. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- .2008. Undang-Undang Nomor: 37 Tahun 2008 tentang: Pelayanan Publik. Penerbit Fokusindo Mandiri. Jakarta.

<https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/23/060000469/era-pemerintahan-di-indonesia-sejak-kemerdekaan?page=all>, diakses tgl 10 April 2021, jam: 09.11.

https://id.wikipedia.org/wiki/Kebijakan_publik, diakses tgl 9 April 2021, jam: 10.16.

<https://www.amazon.com/Encyclopaedia-Britannica-2015-Ultimate-Edition/dp/3803266319>, diakses tanggal 3 April 2021, jam: 19.39.

https://www.researchgate.net/publication/339644251_KONTEKS_SEJARAH_ANALISIS_KEBIJAKAN_dan_KEBIJAKAN_PENDIDIKAN_INDONESIA, diakses 1 April 2021, jam: 11.11.



PENDEKATAN DALAM KEBIJAKAN PUBLIK (MENURUT PARA TOKOH)

Dyah Maharani, S.AP., M.Pd.

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Maulana Yusuf Banten

A. PENDAHULUAN

Sebuah ilmu mengenai kebijakan public merupakan ilmu yang paling cepat perkembangannya dalam ilmu sosial selama beberapa decade terakhir ini. Analisis kebijakan muncul untuk mengerti proses pembuatan kebijakan dengan lebih baik dan untuk membantu para pembuat dan pengambil keputusan dengan keandalannya mengenai pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang masalah-masalah dari berbagai aspek yang mendesak.

Tidak ada kesepakatan yang dapat ditemukan tentang definisi yang tepat dari kebijakan publik. Kebijakan publik dapat digambarkan sebagai kerangka kerja keseluruhan di mana tindakan pemerintah dilakukan untuk mencapai tujuan publik, dengan definisi kebijakan publik yang berfungsi dengan baik, untuk tujuan kita, menjadi studi tentang keputusan dan tindakan pemerintah yang dirancang untuk menangani masalah yang menjadi perhatian publik. Kebijakan adalah tindakan bertujuan yang dirancang untuk menanggapi masalah yang dirasakan. Kebijakan publik

DAFTAR PUSTAKA

- Cochran, Charles L. and Malone, Eloise F. (2014). *Public Policy Perspectives and Choice*. Boulder, CO: Lynne Rienner Publisher.
- A., Etzioni. 1967. *Mixed Scanning: a 'Third Approach' to Decision Making*. *Public Health Administrative Review*. A.F., Jorm *et.al.* 1992. *Effectiveness of Complementary and Self-help Treatments for Depression*. *Medical Journal of Australia*.
- Anderson, James E. 1970. *Public Policy Making*. New York: Reinhart and Wiston.
- Dolbeare, Kenneth M. (ed.). 1975. *Public Policy Evaluation*. Sage Year: Books in Politics and Public Policy.
- Dun, William. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Tachjan, H. 2008. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPIPUSLIT KP2W LEMLIT UNPAD.
- Thoha, Miftah. 2003. *Birokrasi dan Politik di Indonesia*. Jakarta: Raya Grafindo Persada



PROSES KEBIJAKAN PUBLIK

Sriyani, S.E., M.Akt.

POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA STAN

A. PENDAHULUAN

Proses Kebijakan Publik merupakan rangkaian tindakan atau pembuatan sebuah kebijakan publik. Proses pembuatan kebijakan Publik dimulai dari menganalisis permasalahan, meneliti sebab-akibat dari permasalahan tersebut, kemudian Menyusun kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan publik yang sedang terjadi, kemudian melihat kinerja dari kebijakan tersebut sebagai dasar evaluasi terhadap kebijakan yang sudah disusun. Pengetahuan terkait proses kebijakan harus dimiliki pengambil kebijakan dan masyarakat yang merupakan pengguna kebijakan tersebut. Hal ini dapat mengurangi asimetri informasi antara pembuat dan pengguna kebijakan, untuk menghindari hal tersebut pada bab ini akan dijelaskan terkait dengan proses kebijakan publik.

B. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PUBLIK

Kebijakan Publik merupakan hasil dari sebuah penyelenggaraan pemerintahan. Dalam proses pemerintahan, pembuatan kebijakan merupakan salah satu kewajiban. Dalam pembuatan kebijakan tentunya melibatkan berbagai aspek kehidupan bermasyarakat. Ketika kita berbicara

DAFTAR PUSTAKA

- Dunn, William N. 2003. Gajah Mada University Press *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Hamdi, Muchlis. 2015. *Kebijakan Publik*. Cetakan 2. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Jones, Charles O, Istamto Ricky. 1994. *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*. Cet kedua. ed. Nasir Budiman. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rasyid, Muhammad Ryaas. 2007. *Makna Pemerintahan*. Cetakan ke. Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya.



EVALUASI DAN DAMPAK KEBIJAKAN PUBLIK

Ella Dewi Latifah, M.Pd
STAI Al-Falah Cicalengka

A. PENDAHULUAN

Evaluasi merupakan salah satu tahapan penting dalam proses kebijakan publik, namun seringkali tahapan ini diabaikan dan hanya berakhir pada tahap implementasi. Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan. Evaluasi juga merupakan salah satu bentuk penilaian terhadap suatu permasalahan yang mana umumnya hal ini dilakukan untuk menilai baik buruknya permasalahan tersebut. Evaluasi yang digunakan untuk menilai pelaksanaan program kebijakan publik, umumnya tujuannya adalah untuk menghasilkan pengetahuan terbaik tentang dampak program yang sebenarnya. Pengetahuan terbaik seperti dimaksud di atas harusnya didasarkan pada bukti empiris yang relevan, diperkuat oleh fakta yang mencerminkan observasi dunia nyata dan empiris di alam dan terpercaya dalam artian pengetahuan yang dihasilkan menggunakan metode yang ketat. Evaluasi kebijakan dalam perspektif alur proses/siklus kebijakan publik, menempati posisi terakhir setelah implementasi kebijakan, sehingga sudah sewajarnya jika kebijakan publik yang telah dibuat dan dilaksanakan lalu dievaluasi. Dari evaluasi akan diketahui keberhasilan atau kegagalan sebuah kebijakan, sehingga secara normatif akan diperoleh rekomendasi apakah kebijakan dapat dilanjutkan; atau perlu perbaikan sebelum dilanjutkan, atau bahkan harus dihentikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Darwin, Muhadjir. (1994). *Implementasi Kebijakan*. Modul Kursus TMPP MAP-UGM, Yogyakarta
- Dunn, William N. (1998). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta: Gajah Mada University Press
- Dunn, William N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: UGM Press
- Harris, Abdul. (2010). *Evaluasi Pembelajaran*. Yogyakarta: Multi Press
- Ismaly, Irfan Drs. M.MPA. (2002). *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Julia, Sopha. (2010). *Efektifitas Program Bantuan Operasional Sekolah*. Jakarta: Universitas Indonesia
- Nugroho, Riant Dwijodijoto. (2003). *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, Evaluasi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Nugroho, Riant Dwijodijoto. (2004). *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, Evaluasi*. Jakarta: Gramedia
- Nugroho, Riant Dwijodijoto. (2006). *Kebijakan Publik untuk Negara-negara Berkembang*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Parsons, Wayne. (1995). *Public Policy: An Introduction to The Theory and Practice of Policy Analysis*. Landon: Queen Mary Westfield College University
- Riyanto, Bambang. (1997). *Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan*, Edisi 4. BPFE, Yogyakarta
- Subarsono. (2011). *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Wibawa, Samodra, dkk. (1994). *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Winarno, Budi. (2002). *Teori Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pusat Antar Universitas Studi Sosial, Universitas Gajah Mada
- Winarno, Budi. (2004). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo
- Winarno, Budi. (2007). *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Med Press (Anggota IKAPI)
- Winarno, Budi. (2012). *Kebijakan Publik*, CAPS, Yogyakarta



BAB
6

PERUBAHAN KEBIJAKAN PUBLIK

Ardhana Januar Mahardhani, S.AP., M.KP.
Universitas Muhammadiyah Ponorogo

A. PENDAHULUAN

Istilah administrasi publik banyak disampaikan oleh para ahli, salah satunya adalah Chandler dan Plano menjelaskan bahwa administrasi publik merupakan proses tentang tata laksana sumber daya dan personel publik yang telah dikoordinasikan untuk menyusun, melaksanakan, dan mengelola keputusan-keputusan dalam sebuah kebijakan publik (Chandler et al., 1988). Eyestone dalam bukunya *The Threads of Public Policy* mendefinisikan kebijakan publik sebagai suatu hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungan yang ada di sekitarnya, dalam hal ini adalah masyarakat. Proses kebijakan publik merupakan hasil dari seluruh aktivitas sosial masyarakat yang sangat dinamis, diawali dengan proses perumusan kebijakan dengan tahap identifikasi masalah, rumusan tujuan, identifikasi alternatif kebijakan, peramalan sebab akibat dari kebijakan, dan diakhiri dengan memilih alternatif terbaik yang akan diimplementasikan oleh pemerintah kepada masyarakat (Mahardhani, 2018). Seluruh bagian tersebut merupakan suatu aktivitas berantai dan sistemik yang dilakukan untuk menyesuaikan dengan lingkungan masyarakat yang cepat berubah. Kecepatan perubahan dan dinamika sosial masyarakat selalu dengan cepat juga akan direspon oleh

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, J. E. (1984). *Public Policy-Making* (Third). Holt Rinehart & Winston.
- Arifia, I. (2020, April 22). *Mengupas Refomasi Kebijakan Publik Indonesia dari Masa ke Masa*. [Http://News.Unair.Ac.Id](http://News.Unair.Ac.Id).
<http://news.unair.ac.id/2020/05/22/mengupas-refomasi-kebijakan-publik-indonesia-dari-masa-ke-masa/>
- Badjuri, A. K., & Yuwono, T. (2002). *Kebijakan Publik: Konsep dan Strategi*. Universitas Diponegoro.
- Chandler, R., Plano, & Chandler, Ralph C., Plano, J. C. (1988). *The Public Administration Dictionary*. John Wiley & Sons, Ltd.
- Hayat. (2018). *Reformasi Kebijakan Publik: Perspektif Makro dan Mikro* (Hayat (ed.)). Prenada Media.
- Howlett, M., & Ramesh. (1995). *Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystems*. Oxford University Press.
- Kartawijaya, V. (2018). *Perubahan dan Terminasi Kebijakan*.
<https://slideplayer.info/slide/12627530/>
- Keban, P. (2015). Terminasi Kebijakan Publik: Tinjauan Normatif. *Jejaring Administrasi Publik*, 2(VII).
- Lester, J. P., & Stewart, J. (2000). *Public Policy: An Evolutionary Approach* (Second). Wadsworth.
- Mahardhani, A. J. (2018). *Advokasi Kebijakan Publik* (S. Mukaromah (ed.)). CALINA MEDIA.
- Maulana, H. F., Mayunita, S., Hastuti, H., & Wijaya, A. A. M. (2018). Diskursus Kebijakan Publik Model Incremental. *Kybernan: Jurnal Studi Pemerintahan*, 3(1), 1–13.
<https://doi.org/10.35326/kybernan.v3i1.330>
- Moore, M. H. (1995). *Creating Public Value: Strategic Management in Government*. Harvard University Press.
- Nugroho, R. (2014). *Public Policy* (5th ed.). Elex Media Komputindo.
- Pratomo, H. (2015). *Advokasi (Konsep, Teknik, dan Aplikasi) di Bidang Kesehatan di Indonesia*. Raja Grafindo Persada.
- Pritasari, L. A., & Kusumasari, B. (2019). Actor Intervention in Influencing

- Environmental Policy Formulation: The Case Study of Shrimp Farming Relocation Policy in Yogyakarta. *Jurnal Borneo Administrator*, 15(2), 179–198. <https://doi.org/10.24258/jba.v15i2.427>
- Suwitri, S. (2008). Konsep Dasar Kebijakan Publik. *Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang*.
- Suwitri, S. (2011). *Jejaring Kebijakan Dalam Perumusan Kebijakan Publik (Suatu Kajian Tentang Perumusan Kebijakan Penanggulangan Banjir dan Rob Pemerintah Kota Semarang)*. Universitas Diponegoro.
- Tilaar, H. A. R., & Nugroho, R. (2009). *Kebijakan Pendidikan* (2nd ed.). Pustaka Pelajar.
- Waarden, F. (1992). Dimensions and types of policy networks. *European Journal of Political Research*, 21(1–2), 29–52. <https://doi.org/10.1111/j.1475-6765.1992.tb00287.x>



PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP EFEKTIVITAS PROGRAM KELUARGA BERENCANA "DUA ANAK CUKUP" OLEH BKKBN

Indri Arrafi Juliannisa, S.E.,M.E,¹

Hikmah Nurain²

Attifah Meita Rahmah³

UPN Veteran Jakarta

A. PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk melihat kinerja perekonomian, baik di tingkat nasional maupun regional. UNDP (*United Nation Development Programme*) telah menetapkan standar pengukuran pembangunan sebagai refleksi pertumbuhan ekonomi yaitu dari sumber daya manusia yang dituangkan ke dalam Human Development Indeks (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Lumbantoruan & Hidayat, 2014).

Pertumbuhan ekonomi sangat erat akan angka pertumbuhan ekonomi, dimana setiap masing-masing penduduk harus menjadi input yang baik bagi perekonomian dengan cara menjadi sumberdaya manusia yang produktif,

DAFTAR PUSTAKA

- BPS, T. P. (2018). *Statistik Kontruksi*. BPS-Statistic Indonesia.
- Budiono. (2012). *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Yogyakarta : BPFE.
- Didu, S., & Fauzi, F. (2016). PENGARUH JUMLAH PENDUDUK, PENDIDIKAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP KEMISKINAN DI KABUPATEN LEBAK. *JEQu*, Vol. 6, No. 1.
- Kartika, N. Y., & Sari, U. M. (2020). ANALISIS FERTILITAS DI KALIMANTAN SELATAN(Analisis Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2017). *Jurnal Keluarga Berencana* , Volume 5 nomor 1, halaman 16-26.
- Lumbantoruan, E. P., & Hidayat, P. (2014). ANALISIS PERTUMBUHAN EKONOMI DAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) PROVINSI-PROVINSI DI INDONESIA (METODE KOINTEGRASI). *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Vol.2 No.2.
- Pancasasti, R., & Khaerunnisa, E. (2018). Analisis Dampak Laju Pertumbuhan Penduduk Terhadap Aspek Kependudukan Berwawasan Gender Pada Urban Area Di Kota Serang. *Tirtayasa Ekonomika*, Vol. 13, No 1.
- Sunaryanto, H. (2010). Analisis Fertilitas Penduduk Provinsi Bengkulu. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, ISSN 1907-2902, Volum 7, nomor 1, halaman 21 - 41.



PERAN INFORMASI DALAM PEMBUATAN KEBIJAKAN PUBLIK

Apt. Ahmad Subagiyo, S.Si., M.Farm
Universitas Kader Bangsa Palembang

A. PENGERTIAN DATA DAN INFORMASI

Informasi yang berkualitas merupakan inti persoalan manajemen yang sukses. Hawks (1998:131), menyebutkan "*the essence of good management is good information*". Pengelolaan data dan informasi menjadi sangat penting, terutama dalam pembuatan kebijakan publik. Menurut Amsyah (2001:83), data adalah kata jamak sementara kata tunggalnya adalah datum. Datum berasal dari bahasa latin yang berarti fakta, kenyataan, kejadian atau peristiwa. Pengertian data dapat disimpulkan menjadi suatu kebenaran, karena itu ciri atau karakteristik utama data adalah benar. Berdasarkan sumbernya, data dikelompokkan menjadi dua, internal dan eksternal. Data internal adalah data yang berasal dari dalam organisasi itu sendiri serta perangkatnya. Sementara data eksternal adalah data yang berasal dari sumber-sumber yang berada di luar organisasi. Berdasarkan isinya maka data internal maupun eksternal dapat di kelompokkan menjadi empat yaitu : data kegiatan, data hasil penelitian, data lingkungan, dan data peraturan. Data kegiatan terdiri data kegiatan pokok (substantif) dan kegiatan penunjang (fasilitatif). Data, menurut Teskey (1989) dalam Pendit (1992:80) adalah hasil observasi langsung

DAFTAR PUSTAKA

- Hawks, Carol Pitts.1988. Management Information Gleaned from Automated Library Systems. Information Technology and Libraries; Jun 1988; 7, 2; Academic Research Library pg. 131.
- Amsyah, Zulkifli. 2001. Manajemen Sistem Informasi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Lasa Hs.2005.Manajemen Perpustakaan.Yogyakarta:Gama Media
- Yusup, Pawit M.2001.Pengantar Aplikasi Teori Ilmu Sosial Komunikasi Untuk Perpustakaan Dan Informasi. Bandung:Program Studi Ilmu Perpustakaan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran.
- Pendit, Putu Laxman.1992. Kepustakawanan Indonesia: Potensi dan Tantangan. Jakarta:Kesaint Blanc
- Kumorotomo, Wahyudi dan Subando Agus Martono. 1994. Sistem Informasi Manajemen Dalam Organisasi-organisasi Publik. Yogyakarta:Gajah Mada University Press
- Dunn, William N. (1994). Public Policy Analysis: An Introduction, Englewood Cliff. Prentice Hall, Inc.
- Cook Curtins W & Hunsaker Philip. (2007). Management and Organizational Behaviour. New York: McGraw-Hill Education.
- Agustino, Leo. (2006). Dasar-Dasar Kebijakan Publik, Implementasi Kebijakan. Bandung: Alfabeta.
- Winarno, Budi. (2005). Kebijakan Publik, Teori dan Proses (Edisi Revisi). Yogyakarta: Media Presindo.
- Valantin, Robert. (1996). Global program initiative: Information policy research. Information Technology for Development: Vol. 7, No. 2, pp. 95-103
- Rowlands, I (1997), "Understanding information policy : concepts, frameworks and research tools" dalam Understanding Information Policy, ed. I. Rowlands, London : Bowker-Saur, hal. 27 – 45.
- Pendit, Putu Laxman, 2006a, "Ragam Teori Informasi". Makalah, (Jakarta : Pusat Data Informasi Indonesia - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia)
- Pendit, Putu Laxman, 2006b "Kepustakawanan dan Kebebasan Memperoleh Informasi : Dari Informing ke Involving" makalah dalam Seminar KMI, (Surabaya : Universitas Petra).

Haryanto, Ignatius. 2005, Apa Itu Kebebasan Memperoleh Informasi?, Jakarta: Koalisi untuk Kebebasan Memperoleh Informasi Publik - Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP)

Wikipedia, 2021, "[Oct. 2, 1996: FOIA Law Ushers in Digital Democracy](#)". wired.com. Retrieved 6 January 2016.

BAB
9

HUKUM DAN KEBIJAKAN PUBLIK

Dr. Juanrico Alfaramona Sumarezs Titahelu, S.H., M.H.
Universitas Pattimura Ambon

A. PENDAHULUAN

Hukum dan kebijakan publik diibaratkan sebagai dua sisi keping mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Memahami makna ini dapat ditinjau dari sisi definisi keduanya. Menurut Kraft dan Furlong kebijakan publik adalah *“A course of government action (or inaction) taken in response to social problems. Social problems are conditions the public widely perceives to be unacceptable and therefore requiring intervention”* (Riant Nugroho, 2013:3). Sedangkan definisi hukum menurut Prof. Dr. Van Kan adalah *“keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dalam masyarakat”* (Muchsini dan Fadillah Putra, 2002:17).

Permasalahan sosial membutuhkan kebijakan publik sebagai wujud nyata intervensi pemerintah untuk memecahkan permasalahan sosial, baik berupa tindakan maupun tidak bertindaknya pemerintah namun untuk mengintervensinya pemerintah membutuhkan hukum sebagai instrumen guna melindungi hasil kesepakatan kebijakan yang telah diputuskan bersama yang juga cerminan untuk melindungi kepentingan manusia dari berbagai permasalahan sosial dimana hukum dalam pelaksanaannya dapat dipaksakan selain itu juga hukum sebagai legitimasi pemerintah untuk melaksanakan kebijakannya dalam rangka mengatasi permasalahan sosial

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2008. Dasar –Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Anderson, J. E. 2003. Public policymaking: An introduction. Boston: Houghton Mifflin Company.
- Anggara, Sahya. 2013. Sistem Politik Indonesia, Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Asshiddiqie, Jimly. Negara Hukum Indonesia, Makalah, disampaikan pada Ceramah Umum dalam rangka Pelantikan Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Alumni Universitas Jayabaya, di Jakarta, Sabtu, 23 Januari 2010.
- Dhoho A.Sastro,dkk. 2010. Mengenal Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Jakarta:LBH Masyarakat.
- Henri Subagiyo, dkk. 2009. Anotasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Jakarta: Komisi Informasi Pusat.
- Hoogerwerf, A., 1983. Ilmu Pemerintahan, alih bahasa: R.L.L. Tobing. Jakarta: Erlangga.
- Huda, Ni'matul. 2007. Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi. Yogyakarta:Ull Press.
- Islamy, M. Irfan. 2004. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Jakarta : Bumi Aksara.
- 1995. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kansil, C. S. T. 2009. Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- Muchsin dan Putra, Fadillah. 2002. Hukum dan Kebijakan Publik-Analisis atas Praktek Hukum dan Kebijakan Publik dalam Pembangunan Sektor Perekonomian di Indonesia. Malang : Universitas Sunan Giri Surabaya dan Averroes Press.
- Nugroho, Rianto. 2013. Metode Penelitian Kebijakan. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Rahardjo, Satjipto. 1980. Hukum dan Masyarakat. Bandung: Aksara.
- Santosa, Mas Achmad. 2003. Aktualisasi Kebebasan Informasi di Indonesia, Sebuah Perjalanan Panjang dan Mendaki, dalam buku “Melawan Ketertutupan Informasi, Menuju Pemerintahan Terbuka.” Jakarta : Koalisi untuk Kebebasan Informasi.

- Tangkilisan, Hessel, Nogi, S. 2003. Evaluasi Kebijakan Publik, Yogyakarta: Balairung & Co.
- Tjokroamidjojo, Bintoro dan Mustopadidjaja A. R,. 1988. Teori dan Strategi Pembangunan Nasional, Jakarta: CV. Haji Masagung
- Trisasongko,Dadang. 2014. Melawan Korupsi dari Advokasi hingga Pemantauan Masyarakat. Jakarta: Transparency International Indonesia.
- Wahjono, Padmo. 1984. Masalah Ketatanegaraan Indonesia Dewasa Ini. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Wahab, Solichin Abdul. 2008. Analisis Kebijaksanaan, Jakarta : Bumi Aksara.
- 2005. Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: BumiAksara.



ANALISIS PENDAPAT MASYARAKAT MENGENAI KEBIJAKAN PENDIDIKAN SEKSUALITAS BAGI REMAJA

Indri Arrafi Juliannisa, S.E.,M.E.¹

Charia Roswita²

Renaldy Lukmanul Hakim³

UPN Veteran Jakarta

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi yang sangat pesat membuat semakin terbukanya akses remaja dalam mendapatkan berbagai informasi tak terkecuali yaitu konten pornografi, pacaran, dan budaya pergaulan yang lebih bebas. Hal tersebut pada akhirnya akan menimbulkan pergeseran sikap pada remaja termasuk terkait pengalaman seksual. Umur pertama kali berhubungan seksual, erat dengan status kesehatan reproduksi seseorang. Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2017 melaporkan remaja 17 tahun merupakan umur tertinggi baik wanita maupun pria (19%) yang melakukan hubungan seksual pertama kali. Persentase umur pertama berhubungan seksual pada wanita dan pria meningkat dari 59 persen hasil SDKI 2012 menjadi 74 persen pada SDKI 2017. Hal ini juga terjadi pergeseran pada hasil survei umur yang pada SDKI 2012 menunjukkan umur 18-19,

DAFTAR PUSTAKA

References

- Akhir, A. (2017). Pengaruh Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimum Terhadap Kualitas Pelayanan Pendidikan Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Tadulako. *Jurnal Katalogis*. From <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/Katalogis/article/view/7963/6299>
- Anugrahadi, S. (2019). *Mengenal Remaja Generasi Z (Dalam Rangka memperingati Hari Remaja Internasional)*. Retrived from <http://ntb.bkkbn.go.id/?p=1467>.
- BKKBN. (2017). *Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2017*. Retrived from <https://e-koren.bkkbn.go.id/wp-content/uploads/2018/10/Laporan-SDKI-2017-Remaja.pdf>.
- Damayanti, M., Anni, C. T., & Mugiarto, H. (2018). Layanan Informasi dengan Media Gambar Untuk Meningkatkan Pemahaman Seks Education Siswa . *Indonesian Journal Of Guidance and Conseling Theory and Application.*, Volume 7, nomor 1, halaman 37-44.
- Dzulfikar, L. T. (2019). *Akademisi sarankan cara tepat mengajarkan pendidikan seks untuk anak di Indonesia*. Retrived from <https://theconversation.com/akademisi-sarankan-cara-tepat-mengajarkan-pendidikan-seks-untuk-anak-di-indonesia-122627>.
- Erni. (2013). Pendidikan Seks Pada Remaja . *Jurnal Health Quality*, Volume 3 nomor 2.
- Giri, M. K. (2013). Pendidikan Seks Berbasis Karakter Sebagai Upaya Menekan Kasus Aborsi Di Kalangan Pelajar. *Seminar Nasional FMIPA UNDIKSHA III*.
- Kemendes. (2015). Situasi Kesehatan Reproduksi Remaja.
- Khairunisa, N. S., & Sihaloho, E. D. (2019). Determinan Pembangunan Daerah dan Angka HIV/AIDS di Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*. From Retrived from https://www.researchgate.net/profile/Estro_Dariatno_Sihaloho/publication/334162521_Determinan_Pembangunan_Daerah_dan_Angka_HIVAIDS_di_Indonesia/links/5d1adfb392851cf4405ca057/Determinan-Pembangunan-Daerah-dan-Angka-HIV-AIDS-di-Indonesia.pdf

- Mariani, A., & Bachtiar, I. (2010). Keterpaparan Materi Pornografi dan Perilaku Seksual Siswa Sekolah Menengah Pertama Negeri. *Makara, Sosial Humaniora*.
- Mediaindonesia.com. (2019). *Pentingnya Pendidikan Seks Kepada Anak Usia Dini*. Retrived from [https://mediaindonesia.com/humaniora/279002/pentingnya-
pendidikan-seks-kepada-anak-usia-dini](https://mediaindonesia.com/humaniora/279002/pentingnya-
pendidikan-seks-kepada-anak-usia-dini).
- Rinta, L. o. (2018). PENDIDIKAN SEKSUAL DALAM MEMBENTUK PERILAKU SEKSUAL POSITIF PADA REMAJA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KETAHANAN PSIKOLOGI REMAJA . *Jurnal Ketahanan Nasional* , Volume 21, nomor 3. .
- Teja, M. (2020). *Kondisi Sosial Ekonomi dan Kekerasan Seksual Pada Anak*. Retrived from https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-VIII-9-I-P3DI-Mei-2016-73.pdf.

KEBIJAKAN PUBLIK BIDANG EKONOMI

Khairul Rijal, S.E.,M.Ag
STEBIS Muara Enim

A. PENDAHULUAN

Proses kebijakan publik tidak terlepas dari kebutuhan, tuntutan, kepentingan, dan agenda setting semua pihak dalam pemerintahan. Kebijakan publik dibuat adalah untuk menjawab persoalan-persoalan yang muncul dalam kehidupan masyarakat dengan berbagai aspek dan ketentuan yang berlaku di dalamnya.

Kebijakan publik adalah. keputusan-keputusan yang dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kewenangan dalam pemerintahan, baik bersifat formal maupun informal. Sementara Dye (1982) berpendapat bahwa *policy is whatever governments choose to do or not to do*. Artinya bahwa apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah adalah kebijakan publik. Melakukan dengan membuat keputusan atau tidak melakukan dengan tidak membuat keputusan adalah menjadi kebijakan publik. Kebijakan publik pastinya diikuti oleh reformasi yang melekat dalam aspek-aspek kebijakan publik. Formulasi kebijakan, implementasi kebijakan, maupun evaluasi kebijakan adalah tindakan kebijakan publik yang dilakukan berdasarkan kepentingan kepada publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Sani Alhusain, “Kebijakan Pembangunan Ekonomi Kreatif” (2015), “Kebijakan Pemerataan Pembangunan Daerah di Indonesia” (2015). arket/20210126095842-17-218697/bank-syariah-terbesar-ri-hadirini-sejumlah-fakta menariknya), diakses 3 April 2021.
- Agus Sugiarto, “BSI dan Ekosistem Syariah”, *Bisnis Indonesia*, 1 Februari 2021
- Amunisi Baru Pemulihan Ekonomi, *Bisnis Indonesia*, 1 Februari 2021
- BSI Bisa Bantu Pulihkan Ekonomi, *Republika*, 1 Februari 2021
- BSI Perkuat Ekosistem Industri Halal, *Kompas*, 2 Februari 2021
- Bank Syariah Indonesia Beroperasi, *Republika*, 1 Februari 2021
- Bank Syariah Terbesar RI Hadir, Ini Sejumlah Fakta Menariknya”, 26 Januari 2021, (<https://www.cnbcindonesia.com/>)
- Dunn, William N. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Edisi kedua. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 2000.
- Dwiyanto, Agus. *Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Reformasi Birokrasi*. Jakarta: Gramedia.2011
- Inklusif untuk Semua, *Kompas*, 1 Februari 2021,
- Ketiban Berkah Bank Syariah, *Bisnis Indonesia*, 2 Februari 2021,
- Misi Besar Bank Syariah: Bank Syariah Indonesia, *Bisnis Indonesia*, 2 Februari 2021
- Muhammad Nursyamsi dan Lida Puspaningtyas, “Merger Bank Syariah BUMN Dimulai”, *Republika*, 13 Oktober 2020,.
- Siagian, P Sondang. *Administrasi pembangunan: Konsep, Dan Strategi*, Jakarta: Bumi Aksara. 2020
- Yasniva. *Birokrasi Pemerintah Indonesia di Era Reformasi*. *Jurnal Transformasi Administrasi*. Volume 05 Nomor 01, Lembaga Adminsitrasi Negara. 2015



KEBIJAKAN PUBLIK BIDANG TRANSPORTASI

Virginia Claudia Lao, ST., MT

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

A. PENDAHULUAN

Sebagai salah satu faktor pendukung utama yang menjadi urat nadi pengembangan suatu wilayah, transportasi berperan penting terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Kebutuhan perpindahan orang dan distribusi barang yang cepat secara waktu tempuh serta efisien terhadap pemakaian bahan bakar dapat terpenuhi apabila sarana serta prasarana transportasi yang ada, dalam kondisi baik serta terawat.

Suatu wilayah dapat dikatakan berkembang apabila memiliki akses yang terkoneksi dengan baik terhadap seluruh wilayah di sekitarnya, termasuk konektivitas dari sisi udara, laut, darat maupun sungai. Untuk meningkatkan konektivitas pada masing-masing aspek tersebut maka dibutuhkan regulasi yang mengatur terkait penggunaan serta pemanfaatan sarana maupun prasarana yang ada. Regulasi ini kemudian dituangkan sebagai kumpulan kebijakan publik agar masyarakat dapat ikut berperan serta bukan hanya sebagai pengguna dan pelaku transportasi tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga sarana maupun prasarana

DAFTAR PUSTAKA

- Azka. R.,M.. (2020, Desember 17). KNKT: Kecelakaan Darat Paling Sering Terjadi Sepanjang 2020. *Ekonomi.bisnis.com*. Tersedia di <https://ekonomi.bisnis.com/read/20201217/98/1332336/knkt-kecelakaan-darat-paling-sering-terjadi-sepanjang-2020>
- Badan Pusat Statistik. (2017). Indonesia Dalam Angka. Tersedia di https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data/0000/data/1202/sdgs_9/1
- Badan Pusat Statistik. (2020). Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis. Tersedia di <https://www.bps.go.id/indicator/17/57/1/jumlah-kendaraan-bermotor.html>.
- Badan Pengatur Jalan Tol. (2021). Jalan Tol Beroperasi. Tersedia di <https://bpjt.pu.go.id/konten/progress/beroperasi>.
- Cahyo. D.. (2013, Juli 28). 10 Kecelakaan Transportasi Paling Tragis di Indonesia. *Mengakubackpacker.blogspot.com*. Tersedia di <http://mengakubackpacker.blogspot.com/2013/07/10-kecelakaan-transportasi-paling.html>
- Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (2019) . Perhubungan Darat Dalam Angka. Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Jakarta. Tersedia di <http://hubdat.dephub.go.id/data-a-informasi/pdda/tahun-2019/2938-pdda2019>
- Direktorat Jenderal Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan. (2019). Penyiapan Transportasi SDP Dalam Rangka Untuk Meningkatkan Kinerja. Tersedia di <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:N169cIW8mhQJ:hubdat.dephub.go.id/spesial-konten/rakornis-hubdat/2019/bahan-paparan/2865-paparan-direktur-transportasi-sungai-danau-dan-penyeberangan/download+&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=id>
- Fernandez. F.,G.,N.. (2014, September 17). ANGKA KECELAKAAN: Pejalan Kaki Sumbang 30% Korban Laka Lantas. *Bisnis.com*. Tersedia di

<https://ekonomi.bisnis.com/read/20140919/98/258593/angka-kecelakaan-pejalan-kaki-sumbang-30-korban-laka-lantas>

Ihsanuddin et al (2020, Desember 16). Kaleidoskop 2020: 5 Kecelakaan Transportasi Air di Indonesia. *Beritahidup.com*. Tersedia di <https://beritahidup.com/2020/12/kaleidoskop-2020-5-kecelakaan-transportasi-air-di-indonesia-halaman-all/>

Kamilah. N.. (2020, Oktober 19). Ini Deretan Sejarah Kelam Perkeretaapian Indonesia. *Mnews.com*. Tersedia di <https://www.minews.id/kisah/ini-deretan-sejarah-kelam-perkeretaapian-indonesia>

Kementerian Pekerjaan Umum. (2014). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2014 tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan, dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan. Jakarta. Tersedia di https://pug-pupr.pu.go.id/uploads/Produk_Pengaturan/Permen%20PUPR%20No%2003-2014.pdf

Kementerian Pekerjaan Umum. (2012). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 02/PRT/2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Jaringan Jalan. Jakarta. Tersedia di https://peraturan.bkpm.go.id/jdih/userfiles/batang/PERMENPU_02_2012.pdf

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2017). Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2017 tentang Baku Mutu Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru Kategori M, Kategori N, dan Kategori O. Tersedia di https://ditppu.menlhk.go.id/portal/uploads/laporan/1593657998_P eraturan%20Menteri%20LHK%20Nomor%20P%202020%20Tentang%20Baku%20Mutu%20Emisi%20Gas%20Buang%20Kendaraan%20Bermotor%20Tipe%20Baru%20Kategori%20M%20Katagori%20N%20da n%20Katagori%20O.PDF

Kurniawan. D. (2021, Februari 9). Kendaraan Bermotor Dilarang Lewat Kota Tua, Ada Pemberlakuan LEZ. *naikmotor.com*. Tersedia di <https://naikmotor.com/170139/low-emission-zone-diterapkan-di-kota-tua-pengendara-dilarang-melintas>

- Putri. A.,S.. (2020, Februari 6). Kebijakan Publik: Pengertian, Tujuan, dan Ciri-ciri. *Kompas.com*. Tersedia di <https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/06/210000269/kebijakan-publik--pengertian-tujuan-dan-ciri-ciri?page=all>
- Sanjaya. Y.. (2016, Oktober 30). Nih, Ragam Modifikasi Lampu Kendaraan yang Menyalahi Aturan. *Liputan6.com*. Tersedia di <https://www.liputan6.com/otomotif/read/2638737/nih-ragam-modifikasi-lampu-kendaraan-yang-menyalahi-aturan>
- (2018, Juli 17). Kemenhub Pastikan Truk Over Dimensi Akan Kena Sanksi Pidana. *Airindoexpress.com*. Tersedia di <https://airindoexpress.com/kemenhub-pastikan-truk-over-muatan-dimensi-akan-kena-sanksi-pidana/>
- (2020, Desember 25). Dinilai Langgar Prokes, Lion Air: IATA Tidak Merekomendasikan “Kursi Tengah” Sebagai Jaga Jarak. *Lidik.id*. Tersedia di <https://lidik.id/dinilai-langgar-prokes-lion-air-iata-tidak-merekomendasikan-kursi-tengah-sebagai-jaga-jarak/>

BAB
13

TRANSFORMASI KEWARGANEGARAAN DIGITAL DAN KEAMANAN SIBER NASIONAL ABAD 21

Fajar Setyaning Dwi Putra, S.Pd., M.Pd
Universitas Insan Cendekia Mandiri

A. PENDAHULUAN

Studi ini merupakan hasil kajian berbagai literatur dan pengamatan pada dunia siber dewasa ini yang mana kita sadari bersama bahwasanya telah terjadi transformasi digital yang begitu masif pada sendi-sendi kehidupan warga negara modern atau dikenal dengan istilah kewarganegaraan digital . Perubahan ini terjadi begitu cepat sehingga terciptanya sebuah budaya digital (*digital culture*) yang mengakibatkan disrupsi di berbagai bidang kehidupan. Salah satunya adalah bidang keamanan. Bidang keamanan menjadi begitu sangat strategis karena bidang ini merupakan salah satu indikator untuk mencapai stabilitas nasional. Stabilitas nasional adalah keadaan tenang suatu negara dari gejolak-gejolak atau gangguan-gangguan yang bersifat politis, ideologis, sosial, ekonomi dan lain sebagainya sehingga situasi menjadi kondusif dalam mendukung jalannya pembangunan nasional. Sebagai kondisi yang bersifat dinamis, maka aspek-aspek kehidupan berbangsa dan bernegara

DAFTAR PUSTAKA

- Akamai Research .2012. *The State of the Internet: 2nd Quarter*.
- Arianto, Adi Rio. 2016. "*Keamanan Siber Menuju Perang Geometri Antarbangsa: Geometripolitika dan Arsitektur Keamanan Dunia Era Horizontal Abad 21*". Prosiding Konvensi Nasional Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia VII (VENNAS AIHII VII).
- Darrel C. Mente. *Jurisdiction in Cyberspace: A Theory of International Space*. Michigan Telecommunication and Technology Law Review Vol 4 Issue 1.
- Fadel, C., & Trilling, B. (2009). *21st Century Skills: Learning for Life in Our Times*. San Francisco: Jossey-Bass
- Tabroni, Roni. (2012). *Komunikasi Politik Pada Era Multimedia*. Bandung. Simbiosis Rekatama Media
- Tilaar (1998) *Paradigma Baru Pendidikan Nasional* . Jakarta. Rineka Cipta

GLOSARIUM

A

Appraisal : Taksiran nilai properti

Asesmen (assessment) : upaya untuk mendapatkan data/informasi dari proses dan hasil pembelajaran

B

Birokrasi : sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah karena telah berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan.

BALEG : Badan Legislatif

BPOM : Badan Pengawas Obat & Makanan

C

COVID : Corona Virusdeases

CPOB : Cara Pembuatan Obat yang Baik

D

Direct Costs : Biaya-biaya yang mudah ditelusuri

Dualitas Nilai : Nilai-nilai yang sering ditata di dalam suatu hirarki yang merefleksikan kepentingan relative dan saling ketergantungan antar tujuan dan sasaran. Evaluasi memainkan sejumlah fungsi utama dalam analisis kebijakan.

DPR : Dewan Perwakilan Rakyat

E

Efektivitas: tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan.

Evaluator: kegiatan mencari sesuatu yang berharga tentang sesuatu;

Ex Ante: Prediksi dan rekomendasi digunakan sebelum tindakan diambil atau untuk masa datang

Ex Post: deskripsi dan evaluasi digunakan setelah tindakan terjadi atau dari masa lalu

EUA : Emergency Use Authorization

Emisi : Sisa Pembakaran pada kendaraan bermotor yang terdiri dari berbagai zat berbahaya yang dikeluarkan dari knalpot.

F

Formative Evaluation: digunakan ketika suatu produk atau program tertentu sedang dikembangkan dan biasanya dilakukan lebih dari sekali dengan tujuan untuk melakukan perbaikan

FFUP : Fakultas Farmasi Universitas Pancasila

FOIA : Freedom of Information Act

G

H

HSE : Health Safety Environment

I

Implementasi: praktik mendasar untuk menerapkan strategi atau tujuan apa pun.

Indirect cost: biaya tidak langsung atau biaya yang terjadi tidak hanya disebabkan oleh sesuatu yang dibiayai.

Intended consequences: konsekuensi yang direncanakan

Interdependensi: hubungan saling ketergantungan, antara individu atau alam mempunyai ketergantungan dengan alam atau individu lain

Input: segala sesuatu yang dibutuhkan untuk selanjutnya diproses

IAI : Ikatan Apoteker Indonesia

INPRES : Instruksi Presiden

J

K

Kebijakan : adalah sebuah kegiatan mengambil keputusan untuk menyelesaikan persoalan oleh seseorang yang diberi kewenangan untuk kebutuhan publik sesuai aturan dan dipertanggungjawabkan sebagai konsekuensi atas tindakan dan pernyataannya.

Kebijakan publik : adalah tindakan-tindakan yang dilakukan/tidak oleh pemerintah (government) yang berfokus pada tujuan tertentu untuk kepentingan publik. Kebijakan publik berbentuk ketentuan-ketentuan/perundang-undangan/peraturan yang sifatnya mengikat dan memaksa.

Kebijakan Negara : adalah jalan mencapai tujuan bersama yang dicita-citakan. Kebijakan Negara yang memerlukan penjelasan atau yang sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan.

Kausalitas: hubungan yang dibentuk atas suatu kejadian (sebab) dan dampaknya

KIP : Keterbukaan Informasi Publik

KKMI : Koalisi Kemerdekaan Memperoleh Informasi

KMI : Kebebasan untuk Memperoleh Informasi

Konektivitas : Suatu hubungan yang saling berkesinambungan antara daerah satu dengan daerah lain.

L

LSF : Lingkar Studi Farmasi

LSM : Lembaga Swadaya Masyarakat

M

Moda Transportasi : Jenis atau bentuk transportasi

N

NGO : Non Government Organization

O

Outcome: efek jangka panjang dari proses pendidikan misalnya penerimaan di pendidikan lebih lanjut, prestasi dan pelatihan berikutnya, kesempatan kerja, penghasilan serta prestise lebih lanjut.

P

PAN : Pendayagunaan Aparatur Negara

PIC/S : Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme (PIC/S)

PSF-CI : Pharmacien Sans Frontier Comite International

Prasarana : Segala sesuatu yang merupakan penunjang utama. terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek)

Parking On The Street : Parkir kendaraan pada badan jalan.

Q

R

Rating: evaluasi atau penilaian terhadap sesuatu, baik dari segi kualitas, kuantitas, atau kombinasi keduanya

Resistensi: Ketahanan

RDPU : Rapat Dengar Pendapat Umum

RI : Republik Indonesia

RSIA : Rumah Sakit Ibu dan Anak

RUU : Rancangan Undang Undang

Regulator : Pihak yang memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengeluarkan peraturan.

RIPN : Rencana Induk Pelabuhan Nasional.

S

Summative Evaluation: evaluasi yang dilakukan setelah program berakhir.

Sarana : Segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan.

SDP : Sungai, Danau dan Penyeberangan.

T

U

Unintended consequences: konsekuensi yang tidak direncanakan

UU : Undang Undang

V

W

WHO : World Health Organization

X

Y

Z

PROFIL PENULIS

Dr. Imanuddin Hasbi, S.T., M.M.



Penulis menempuh pendidikan jenjang S1 Teknik Manajemen & Industri, Universitas Pasundan Bandung, S2 Magister Manajemen, Sekolah Tinggi Manajemen Bandung dan S3 Administrasi Pendidikan, Universitas Pendidikan Indonesia. Pendidikan dan pelatihan sertifikasi profesi Metodologi Asesor dari BNSP, sertifikasi profesi keahlian bidang Brand, Service, dan Selling dari BNSP & Markplus Institut, dan sertifikasi profesi Certified Coaching Entrepreneurship dari Coaching Indonesia. Penulis sebagai dosen menjalankan misi tridharma perguruan tinggi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat bidang Manajemen, Administrasi dan Kewirausahaan, di Universitas Telkom. Penulis menulis buku Manajemen Sumber Daya Manusia, Rencana Pemasaran Efektif, Riset Pemasaran, Entrepreneurship, Manajemen Sumber Daya Manusia (Sebuah Strategi, Perencanaan, Dan Pengembangan), Manajemen Pariwisata, Sosiologi Komunikasi, Manajemen Risiko, Perilaku Konsumen, Komunikasi Organisasi, Tata Hukum Indonesia, Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini, Perkembangan Peserta Didik, Penganggaran Perusahaan, dan Manajemen Pembiayaan Pendidikan.

Ir. Hartoto, M.Si.



Penulis adalah Lektor bidang spesialisasi Akuntansi Sektor Publik pada Jurusan Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Miftahul Ulum Tanjungpinang. Pemerhati masalah kemiskinan, pelayanan public, termasuk pembangunan ekonomi wilayah. Sejak lulus sarjana ekonomi Pertanian Unuversitas Lampung tahun 1990. Pada tahun 2003, mengambil program magister ilmu ekonomi pada Universitas Mulawarman dan ditempuh sekitar 20 bulan. Banyak kursus maupun pelatihan yang pernah diikuti, seperti TOT Pendamping PKH, TOT Pendamping KUBE, TOT UMKM dan Koperasi, TOT Kader Bangsa, Pemebrdayaan masyarakat, pendidikan anti korupsi, pengiat anti narkoba, dan lain sebagainya.

Hartoto sering terlibat dalam kegiatan jasa konsultasi pada banyak lembaga dan kementerian baik yang dibiayai oleh APBN, APBD, maupun bantuan luar negeri. Jasa konsultasinya beragam dari pemberdayaan Koperasi UMKM, Pertanian/pedesaan, pelayanan public, kredit perbankan, studi kelayakan, proyek implementasi yang meliputi hampir seluruh NKRI. Terlibat dalam beberapa jasa konsultasi dalam manajemen keuangan, perdagangan internasional. dan kebijakan publik menjadi perhatiannya.

Dyah Maharani, S.AP., M.Pd.



Penulis dilahirkan di Jayapura pada tanggal 22 April 1982. Masa kecilnya dihabiskan di kota Bandung dengan mengikuti tempat tugas ayahanda bekerja sebagai Pegawai BUMN. Penulis menempuh masa Sekolah Dasar di SD Priangan Kota Bandung, kemudian menjalani Sekolah Menengah Pertama di SMP Balai Perguruan Putri (BPP) Kota Bandung, lalu menempuh Sekolah Menengah Atas di SMAN 2 Bandung. Pendidikan Tinggi S1 penulis di tempuh di Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR) di Kota Bandung pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (FISIP) dengan Program Studi Administrasi Publik. Pendidikan S2 dilanjutkan di Program Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Indonesia Program Magister Pendidikan dengan konsentrasi Manajemen Sumber Daya Manusia. Sekarang penulis mengabdikan sebagai Dosen Tetap di Program Studi Administrasi Publik STIA Maulana Yusuf Banten.

Sriyani, S.E., M.Akt.



Penulis lahir di Yogyakarta, 8 Maret 1977, menyelesaikan pendidikan Diploma 3 Akuntansi di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) pada tahun 1998, menyelesaikan Strata 1 pada Jurusan Akuntansi lulus pada tahun 2003, dan menyelesaikan pendidikan Strata 2 pada Jurusan Akuntansi pada tahun 2010. Mengajar di STAN sejak tahun 2000 mengampu mata kuliah Pengantar Akuntansi, Akuntansi Biaya dan Akuntansi Pemerintah. Mengambil Jabatan Fungsional Dosen dan bergabung pada Politeknik Keuangan Negara STAN pada bulan November 2016 dan mengampu mata kuliah Akuntansi Pemerintah Pusat/Daerah,

Penatausahaan Bendahara, Akuntansi Biaya dan Pengantar Akuntansi. Pada tahun 2017 sampai dengan sekarang menjabat sebagai Ketua Program Studi Diploma 1 Kebendaharaan Negara Politeknik Keuangan Negara STAN dan aktif menjalankan Tri Darma Perguruan Tinggi termasuk membimbing KTTA dan Skripsi mahasiswa. Penelitian/Publikasi yang pernah dilakukan antara lain Penelitian/Publikasi Efektifitas Pengelolaan Keuangan Desa; Studi Kasus atas Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Garut,, dan Evaluasi Penggunaan Dana Desa.

Ella Dewi Latifah, M.Pd



Penulis dilahirkan di Bandung, 24 November 1982. Penulis sekarang bertempat tinggal di Kp. Babakan Peuteuy Rt. 003/Rw. 007 Desa Babakan Peuteuy Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung 40395. Sedangkan riwayat Pendidikan Formal penulis yaitu penulis bersekolah di SDN III Tenjolaya Cicalengka, SLTP “FK” Bina Muda Cicalengka, SMAN 1 Cicalengka, S1 Jurusan PPKn di UPI Bandung, dan S2 PKn UPI Bandung. Penulis pernah mengajar di STAISMAN Pandeglang dari tahun 2005-2006, dan mengajar di STAI Al-Musdaryyah Cimahi dari tahun 2006-2012. Alhamdulillah sejak tahun 2014 sampai sekarang penulis sudah menjadi Dosen tetap pada Prodi PAI di STAI AL-Falah Cicalengka.

Ardhana Januar Mahardhani, S.AP., M.KP.



Penulis lahir di Tulungagung pada tanggal 23 Januari 1987. Merupakan dosen tetap di Universitas Muhammadiyah Ponorogo pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Menempuh pendidikan formal S1 Administrasi Publik Universitas Brawijaya Malang, S2 Magister Kebijakan Publik Universitas Airlangga Surabaya, dan S3 Administrasi Publik di Universitas Diponegoro Semarang. Penulis juga merupakan sekretaris Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (AP3Knl) Provinsi Jawa Timur.

Saran dan kritik membangun sangat penulis harapkan dalam proses kesempurnaan tulisan dari penulis. Pembaca dapat menghubungi penulis melalui email: ardhana@umpo.ac.id

Indri Arrafi Juliannisa.,S.E.,M.E,



Penulis lahir di Bandar Lampung, 13 Juli 1993, berprofesi sebagai dosen di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPN Veteran Jakarta) sejak tahun 2017. Menyelesaikan studi sarjana pada tahun 2015 di Universitas Lampung dan menyelesaikan studi magister tahun 2017 di Universitas Padjadjaran. Memiliki jabatan fungsional sebagai lektor, dan memiliki kepakaran menulis dalam bidang ilmu ekonomi pembangunan dan ekonomi publik, adapun ID google scholar adalah : 5Oq3oekAAAAJ, dan ID SINTA adalah : 6197779. Memiliki hoby menonton film gender action, horror dan comedy, dan juga berprofesi sebagai editor jurnal di Fakultas Ekonomi dan Bisnis (UPN Veteran Jakarta) sejak tahun 2021.

Hikmah Nurain



Penulis lahir di Depok, 25 September 1999, saat ini berstatus sebagai mahasiswa di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPN Veteran Jakarta) sejak tahun 2018. Menyelesaikan studi tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 10 Depok dan menyelesaikan studi tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 12 Depok. Berpengalaman dalam Organisasi Himpunan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan dua periode yaitu tahun 2019 dan 2020 dengan jabatan tertinggi sebagai Kepala Departemen Sosial Kesejahteraan. Memiliki hoby melukis aliran naturalisme dan mendengarkan musik.

Attifah Meita Rahmah



Penulis lahir di Bantul, 4 Mei 1999, saat ini berstatus sebagai mahasiswi di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPN Veteran Jakarta) sejak tahun 2018. Menyelesaikan studi tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Jakarta dan menyelesaikan studi tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) di Madrasah Aliyah Negeri 7 Jakarta. Berpengalaman dalam Organisasi Himpunan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan dua periode yaitu tahun 2019 dan 2020 dengan jabatan tertinggi sebagai Kepala Divisi Penelitian dan Pengembangan. Memiliki hoby dalam bidang fotografi dan musik.

Apt. Ahmad Subagiyo, S.Si., M.Farm



Saat ini penulis diamanahi sebagai Direktur Eksekutif Pusat Kajian Farmasi & Kesehatan. Lulus Sarjana Sains dari Jurusan Farmasi, Fakultas MIPA, UI, dan melanjutkan Program Profesi Apoteker di kampus yang sama. Malang melintang di dunia kefarmasian di berbagai sektor pekerjaan dan pelayanan kefarmasian, sempat menjadi Medical Representative salah satu BUMN Farmasi, Warehouse Pharmacist sekaligus HSE Co-ordinator di PT Organon Indonesia. Bergabung dengan salah satu NGO Perancis, Pharmaciens Sans Frontier – Comite International (PSF-CI) sebagai Technical Advisor pada Tsunami Aceh & gempa Yogyakarta. Praktik sebagai Kepala Instalasi RSIA Aulia, Jagakarsa. Praktik sebagai Apoteker Pelayanan di Apotek Kimia Farma 42 Blok M. Setelah menyelesaikan Sekolah Pascasarjana FFUP, dipercaya menjabat Dekan Fakultas Farmasi Universitas Kader Bangsa Palembang. Pendiri & Presiden Direktur Harian Daring Warta Apoteker (<https://www.warta-apoteker.com/>), Ketua Umum Lingkar Studi Farmasi (LSF) dan Anggota Ikatan Apoteker Indonesia (IAI). Aktif diundang sebagai narasumber di beberapa seminar dan menjadi pendiri Radio Streaming Apoteker FM (<https://radio.apoteker.id/>). Waktu luangnya digunakan untuk mengisi blog pribadi Subagiyo Dot Com (<https://www.subagiyo.com/>) dan bercita-cita

melanjutkan studi Program Doktoral di bidang Ilmu Kefarmasian dengan minat Kebijakan Farmasi Komunitas / Klinis.

Dr. Juanrico Alfaramona Sumarezs Titahelu, S.H., M.H.



Penulis lahir di Jakarta, 23 November 1980. Penulis merupakan alumnus Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado dan meraih gelar Sarjana Hukum (S.H) pada tahun 2004. Kemudian melanjutkan studi Magister Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi Manado dan meraih gelar Magister Hukum (M.H) tahun 2006. Penulis melanjutkan meraih gelar Doktor Ilmu Hukum pada Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2016. Tahun 2008 penulis diangkat sebagai CPNS pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon dan tahun 2010 diangkat sebagai PNS dengan status dosen tetap. Saat penulis dipercayakan sebagai Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Pattimura periode 2020-2024. Beberapa artikel telah banyak diterbitkan di jurnal nasional dan internasional diantaranya Strengthening Pela-Gandong Alliance Based on John Rawls' Theory of Justice (2015), The Essence of Human Rights Violations in Social Conflict in Maluku (After the Riots in 1999) (2019), The Effectiveness of Law Number 6 Year 2018 and Law Number 4 Year 1984 in Handling The Covid-19 Pandemic for Inter Island Travel in Ambon City (2021). Selain itu penulis juga aktif dalam kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat.

Charia Roswita



Penulis lahir di Kuningan Provinsi Jawa Barat tanggal 17 Oktober 1999. Saya merupakan anak pertama dari tiga bersaudara. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan Sarjana Ekonomi Pembangunan di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPN Veteran Jakarta) sejak tahun 2018. Menyelesaikan pendidikan di SMAN 54 Jakarta Timur pada tahun 2017. Memiliki hobi mendengarkan musik, menonton film, dan melukis.

Renaldy Lukmanul Hakim



Penulis lahir di Jakarta tanggal 26 Maret 1999. Saya merupakan anak keenam dari enam bersaudara. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan Sarjana Ekonomi Pembangunan di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPN Veteran Jakarta) sejak tahun 2018. Menyelesaikan pendidikan di SMA Negeri 31 Jakarta pada tahun 2017. Memiliki hobi mendengarkan musik dan juga menonton film bergenre action, horor, dan Sci-fi.

Khairul Rijal, S.E.,M.Ag



Penulis lahir 11 Februari 1994 di Baturaja, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) biasanya dipanggil Rijal dari pasangan Saili dan Nurhayati. Ia menikah dengan Ade Yolanda putri dari Alm M Nur Sofyan dan Ratnawati. Ia menamatkan pendidikan formal di SDN 26 Lawang Kidul 2006. Selanjutnya, ia menempuh pendidikan SMPN 2 Lawang Kidul 2009, dan SMAN 1 Lawang Kidul, Tanjung Enim 2012. Selepas menamatkan pendidikan SMA ia melanjutkan pendidikan perguruan tinggi (S1) di dua Universitas sekaligus yakni satu di Jurusan Ekonomi Islam di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang dan satu lagi di Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya, kemudian ia juga melanjutkan studi Pascasarjana di dua tempat sekaligus yakni di International Islamic University Malaysia dengan jurusan Master of Business Administration (MBA) dan juga mengenyam Pascasarjana pada jurusan Studi Islam, UIN Raden Fatah Palembang. Pengalaman organisasi wakil ketua Syariah English Club (SEC), Ketua Himpunan DPS, Ketua Baitul Maal FEBI, Presiden Pusat Kajian Ekonomi Islam, Koordinator Forum Silaturahmi Studi Ekonomi Islam Sumatera Bagian Selatan, Anggota Islamic Economic Forum for Indonesian Development (ISEFID) IIUM, anggota FOTAR IIUM, Anggota PPI IIUM, Ketua Alumni FosSEI Malaysia. Selain berorganisasi di dalam tataran perguruan tinggi, Rijal juga aktif dalam kegiatan sosial dan menjadi relawan dari beberapa lembaga yakni LAZ DT Palembang, Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Sumatera Selatan, Anggota Masyarakat Ekonomi Syariah (MES)

Malaysia dan saat ini aktif sebagai Sekretaris Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Muara Enim. Beberapa prestasi yang telah diraih antara lain: Juara 1 lomba Olimpiade Ekonomi Islam tingkat perguruan tinggi UIN Raden Fatah Palembang, 2015, Juara 2 lomba Futsal tingkat perguruan tinggi UIN Raden Fatah Palembang, Juara Best Group di ajang Asia Student Summit, Korea Selatan, 2017, sebagai Finalis paper ASEAN Islamic Economic Summit, Malaysia, 2017, sebagai Best Student of University UIN Raden Fatah Palembang 2017, Penerima Beasiswa BEPASIBA PTBA. Sementara itu, riwayat pekerjaan dimulai menjadi seorang pebisnis sejak awal kuliah 2012 sampai saat ini (mulai dari jualan keripik, pulsa, buku, makanan dan minuman serta percetakan) selain itu juga menjadi pegawai koperasi syariah 2015- sekarang, menjadi peneliti di Share-E Management 2018-sekarang. Ia pernah bekerja di Sekolah Tinggi Ekonomi Bisnis Islam (STEBIS) Pagar Alam 2019. Saat ini ia mendapatkan amanah sebagai Kepala Prodi Ekonomi Syariah di Sekolah Tinggi Ekonomi Bisnis Islam (STEBIS) Muara Enim. Kemudian saat ini juga menjadi seorang Penyuluh Agama di Kabupaten Muara Enim. Dengan kesibukan yang ada, beliau tetap senantiasa berbagi ilmu dengan mengisi kajian, penyuluhan, majelis taklim, seminar, talkshow dan acara sejenisnya. Sebagai penulis ia juga aktif dalam penelitian yang diselenggarakan lembaga lokal maupun nasional dan juga aktif menulis di berbagai media massa cetak dan online. Di antara karya tulis dalam bentuk proceeding; Penulis *paper Crowdfunding as waqf financial intermediation to develop the rule of sosial capital, Padang, (2019)* Penulis *paper Financial Performance Measurement Model Modification Using Tools of Ritchi Kolodinsky and International Standard Zakat of Management (ISZM), PUKASBASNAS, Bandung(2019)*; Penulis paper Potensi Pembayaran Zakat Secara Online dan Manual serta Realisasi Dana Zakat Indonesia, Palembang (2019); Penulis *paper Analysis of Online Portal Use and E-Payment Application: Case Study BAZNAS Indonesia (ICONZ) PUKASBAZNAS, Yogyakarta (2018)*; Penulis paper Impact of Zakat on Allevation of Proverty and International Improved Welfare of Mustahik (Case : BAZNAS South Sumatra Province) Bengkulu, (2018); Penulis paper Integration of Capital Market Based on Mutual Product (IIUM), Malaysia, (2017); Penulis paper Integration of sociopreneur for Indonesian Development, Seoul, South Korea, 2017; Penulis paper Pemikiran Yusuf

Qardhawi “zakat sebagai solusi kemiskinan”, Palembang, 2017; Penulis Buku: Ekonomi Islam (2020), Pengantar Perbankan Syariah (2020), Collective Leadership (2020), Pengantar Bisnis (2020), Perilaku Organisasi(2020) dan 30 Problem zakat, (2016).

Virginia Claudia Lao, ST., MT



Penulis lahir di Kota Ujung Pandang tanggal 20 November 1982. Menempuh perkuliahan tingkat Strata 1 Fakultas Teknik Jurusan Teknik Sipil pada Universitas 45 Makassar tahun 2005 dan memperoleh gelar Sarjana Teknik. Kemudian melanjutkan tingkat Strata 2 Fakultas Teknik Jurusan Teknik Sipil Program Studi Transportasi pada Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2009 dan memperoleh gelar MT (Magister Teknik). Pernah berkarir sebagai Konsultan Pengawasan Jalan dan Jembatan selama 3 (tiga) tahun mulai dari tahun 2006 - 2008 dengan posisi sebagai Material Technician. Pada tahun 2010 lulus seleksi CPNS pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan mendapat penempatan di Satuan Kerja Perencanaan dan Pengawasan Provinsi Sulawesi Selatan dengan jabatan sebagai staf teknik sampai pada bulan September tahun 2017. Dari bulan Oktober 2017 sampai sekarang mendapat penugasan di Kota Mamuju pada Satuan Kerja Perencanaan dan Pengawasan Provinsi Sulawesi Barat dan saat ini menjabat sebagai Asisten Program dan Perencanaan.

Fajar Setyaning Dwi Putra, S.Pd., M.Pd



Penulis lahir di Bandung, 19 Januari 1992 putra kedua dari pasangan Awan Rusmanandar dan Mega Tachtaning Pribadi ini merupakan dosen pada bidang keilmuan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Saat ini menjabat sebagai Wakil Dekan I Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Insan Cendekia Mandiri dan sedang menempuh studi doktoral dalam bidang Pendidikan Kewarganegaraan di Universitas Pendidikan Indonesia. Penulis aktif menulis artikel di beberapa media massa diantaranya adalah kolomnis di

Radar Bandung dan Harian Rakyat Maluku. Selain itu, ia juga merupakan ketua penyunting Jurnal Pendidikan, Pembelajaran, dan Pemberdayaan Masyarakat (JP3M) dan Tutor Online di Universitas Terbuka. Beberapa organisasi yang pernah terlibat di antaranya adalah Forum Publikasi Ilmiah Indonesia, Persatuan Dosen Perguruan Tinggi Nusantara, Persaudaraan Dosen Republik Indonesia, Asosiasi Dosen Perguruan Tinggi Swasta dan Asosiasi Pendidikan Masyarakat Indonesia.

KEBIJAKAN PUBLIK

Buku kebijakan publik ini diterbitkan sebagai bahan pengajaran dan bahan penambahan wawasan serta keilmuan khalayak umum, karena akan banyak berkontribusi, baik di bidang riset, pengetahuan, wawasan dan keilmuan bagi para calon sarjana maupun pembaca lainnya. Ditinjau dari definisinya, Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seorang individu, kelompok maupun pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan dan kemungkinan-kemungkinan atau kesempatan dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

Setiap individu, kelompok maupun pemerintah masing-masing memiliki kebijakan yang berbeda, hal itu terjadi dikarenakan setiap kegiatan atau tindakan yang dilakukan akan senantiasa memiliki perbedaan dan memiliki ciri khas disetiap lingkungannya. Buku ini layak dibaca dan dipelajari sebagai sebuah pemahaman awal berbagai aspek pelayanan publik karena didalamnya dimuat pengertian serta evaluasi pelayanan publik. Ini adalah buku pengantar untuk mahasiswa atau siapa saja yang berminat mempelajari kebijakan publik.



Penerbit
widina
www.penerbitwidina.com

ISBN 978-623-6092-82-8



9 786236 092828